

PROVINSI SUMATERA BARAT



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2027



RS Jiwa Prof. HB. Saanin

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Tahun 2027.

Pada dasarnya Renja merupakan dokumen Rencana Kerja yang dipakai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang untuk Tahun Anggaran 2027 dan sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja, baik kinerja kegiatan maupun kinerja keuangan. Dalam penyusunan Rencana Kerja, RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi oleh Rumah Sakit. Renja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Rumah Sakit dalam menyesuaikan perubahan kegiatan dan anggaran organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

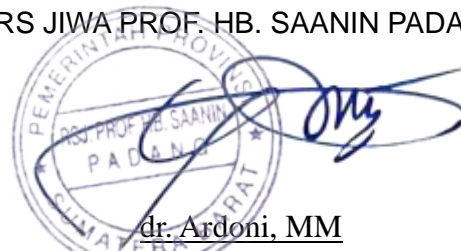
Renja RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dan Rancangan Teknokratis Rencana Strategis (RENSTRA) RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2025-2029 yang bersifat indikatif. Selanjutnya Renja OPD menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun anggaran 2026.

Tak lupa diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Padang, Mei 2026

DIREKTUR

RS JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG



dr. Ardoni, MM

NIP. 19720513 200501 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA SKPD TAHUN 2025.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2025 dan Capaian Renstra SKPD.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	25
2.3 Isu-isu penting dan catatan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.....	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	31
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TA. 2027 ...	33
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	34
3.3 Program dan Kegiatan	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	39
BAB V PENUTUP.....	433

BAB I PENDAHULUAN

Upaya peningkatan pelayanan rumah sakit pada dasarnya berkesinambungan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan publik, dalam mengatasi peningkatan derajat kesehatan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang harus melibatkan berbagai pihak. Rumah Sakit Jiwa sebagai institusi kesehatan harus menerapkan prinsip *clinical governance* dan *corporate governance* yang berfokus kepada kesehatan pasien, pembuktian ilmiah, dan sejalan dengan tindakan profesional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi rumah sakit perlu memperhatikan tugas klinik dengan prinsip kaidah *clinical governance* dan organisasi rumah sakit yang baik dengan prinsip *good corporate governance* sehingga akan menjadikan rumah sakit yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Rencana kerja tahunan SKPD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang disusun bertujuan untuk mencapai sasaran pelayanan kepada masyarakat sebagai urusan wajib berupa pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan rujukan sebagai tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.1 Latar Belakang

a. Pengertian Rencana Kerja.

Rencana kerja (renja) disusun untuk kegiatan kurun waktu satu tahun dan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran utama sebagai pelaksana pelayanan kesehatan rujukan terutama pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Sumatera Barat.

b. Proses Penyusunan Renja SKPD.

Proses Penyusunan Rencana Kerja tahun 2027 berpedoman kepada Permendagri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu rencana kerja Tahun 2027 berpedoman kepada Rancangan Renja SKPD provinsi dan kabupaten/kota disusun mengacu pada rancangan akhir RKPD; mengacu pada Renstra SKPD; mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya; untuk memecahkan masalah yang dihadapi; berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Proses penyusunan Rencana Kerja RS Jiwa Prof. HB Saanin Padang Tahun 2027 dengan pembentukan Tim Perumus Renja 2027 bekerja dengan cara berupa: pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan OPD dengan provinsi; meninjau hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD; penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi OPD provinsi; penelaahan rancangan akhir RKPD provinsi; perumusan tujuan dan sasaran; penelaahan usulan masyarakat; dan perumusan kegiatan prioritas.

- c. Keterkaitan Renja OPD, dokumen RKPD, Renstra OPD dengan Renja K/L dan Renja Provinsi.

Rencana kerja 2027 RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang mengacu pada RPJMN 2025-2029 sesuai agenda prioritas dengan fokus pada prioritas ketiga meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan strategi pada dimensi Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan program Indonesia Sehat. Kemudian juga berpedoman kepada Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Selain dari pada itu berpedoman pada Renstra Kementerian Kesehatan RI 2025-2029 dengan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi - tingginya melalui Program Indonesia Sehat dengan fokus penguatan pelayanan kesehatan melalui paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan pemantapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Arah kebijakan Kementerian Kesehatan 2025-2029 berfokus pada transformasi sistem kesehatan nasional untuk mewujudkan masyarakat sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045. Fokus utamanya mencakup penguatan layanan primer, rujukan (10 penyakit tertinggi/katastrofik), eliminasi TBC, penurunan stunting, serta transformasi digital dan SDM.

Rencana kerja RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2027 ini juga berpedoman pada Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dengan melanjutkan 2 Program prioritas dengan fokus prioritas pada Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, yang dijabarkan pada rencana strategis (Renstra) RS Jiwa Prof. HB.Saanin Padang 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya pelayanan kesehatan jiwa, karena kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari Kesehatan dan unsur utama dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup manusia yang utuh. Sesuai perkembangan yang terjadi saat ini RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang adalah institusi sarana pelayanan kesehatan jiwa yang tidak hanya berfungsi sosial, tetapi telah berkembang menjadi unit pelayanan kesehatan yang harus dapat mengoptimalkan pendapatannya dengan jalan meningkatkan dan mengembangkan jenis-jenis pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan melaksanakan fungsi RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, diperlukan perencanaan secara sistematis dan berkesinambungan yang dijabarkan dalam beberapa dokumen perencanaan sesuai dengan waktu pelaksanaannya.

1. Rencana Kerja RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2027 merupakan tahun ke-tiga pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027. Dokumen perencanaan tahunan tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

2. Rencana Kerja RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang tahun 2027 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat *bottom-up*. Unit kerja di lingkungan Rumah Sakit sebagai ujung tombak pelayanan, wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan proyeksi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing unit kerja tersebut. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan kebijakan dalam menentukan program-program prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bidang kesehatan dan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu selama Tahun 2027.
- d. Tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.
- Program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Tahun 2027 ini merupakan proses penyusunan anggaran masing-masing OPD untuk disampaikan dalam RAPBD Tahun 2027. Pedoman penyusunan RENJA Tahun 2027 juga memperhatikan realisasi program dan kegiatan Tahun 2025 dan proyeksi realisasi kegiatan Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun Anggaran 2026, sejumlah peraturan Perundangan, Perda dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan RENJA OPD adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor: 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 687);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata cara Evaluasi Ranperda APBD, Perubahan APBD, Ranperkada Penjabaran APBD, Ranperkada Penjabaran Perubahan APBD;
19. Permendagri Nomor : 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Perubahan atas Permendagri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
27. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Datuak Tan Pari;
29. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan;

30. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 440-538-2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB.Saanin Padang Untuk Melaksanakan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh;
31. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 050/1/I/P2EPD/Bappeda-2026 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja Tahun 2027 RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang adalah:

1. Sebagai pedoman bagi RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun 2027
2. Sebagai bahan/dasar bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027
3. Sebagai pedoman untuk mencapai Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada Renja RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan tindak lanjut proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lain yang mengatur SOTK, kewenangan OPD dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2025 dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian terhadap evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2025, perkiraan capaian tahun 2026, kaitan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun lalu.

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK.

1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Menguraikan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, juga menguraikan koordinasi dan sinergi program antara OPD Provinsi dengan OPD Kabupaten/Kota serta dengan kementerian atau lembaga di tingkat pusat dalam pencapaian kinerja pembangunan. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tupoksi OPD. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD. Juga formulasi isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

1.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Memuat uraian proses membandingkan antara rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan alasan proses tersebut dan penjelasan temuan setelah proses review dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan akhir RKPD.

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat uraian kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota.

BAB. III. TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2026

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Menguraikan tentang telaah terhadap kebijakan Nasional dan Daerah yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah terkait Tupoksi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan Tupoksi OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dari kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD.

BAB. IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA SKPD TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2025 dan Capaian Renstra SKPD

a. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra SKPD.

Indikator kinerja utama (IKU) Renstra RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa	Tingkat Akreditasi RS	Paripurna	Paripurna	100%
	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	94.91%	95,58%	100,7%
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai A (83,77%)	A (85,94)	102%
Meningkatkan Kemandirian Keuangan RS	Tingkat Kemandirian Keuangan	60%	61,47%	102,4%

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa masyarakat sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa

Tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi seluruh lapisan masyarakat dengan didukung sarana prasarana yang memadai, diwujudkan dengan 2 (dua) sasaran yaitu meraih akreditasi paripurna rumah sakit dan meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

a. Sasaran 1:

Pada sasaran 1 diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu:

1. Tingkat akreditasi Rumah Sakit dan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap seluruh layanan RS.

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 2 sebagai berikut:

TABEL 2		Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa		
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Tingkat Akreditasi RS	Paripurna	Paripurna	100%
2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap seluruh layanan Rumah Sakit	94.91%	95,58%	100,7%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1, tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada tahun 2025 sebesar 100,7% dan dalam skala pengukuran kategori Sangat Baik.

Dari 2 (dua) indikator kinerja pada sasaran 1 (satu) mencapai dan melewati target dan perlu untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan realisasi untuk tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya capaian masing-masing indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

1). Tingkat Akreditasi Rumah Sakit

Pada mulanya tahun 2003 Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang telah terakreditasi lulus penuh tingkat dasar, yang awalnya hanya mencakup 5 (lima) pelayanan, kemudian meningkat dan terus berkembang, pada Tahun 2011 sudah mencakup 12 jenis pelayanan, yang meliputi: administrasi manajemen, pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, rekam medis, instalasi farmasi, laboratorium, K3 dan pengendalian infeksi nosokomial, instalasi radiologi, gizi, dan rehabilitasi medik. Pada Tahun 2016 telah lulus akreditasi versi 2012 dengan predikat paripurna. Kemudian tahun 2019 pada survei Akreditasi versi SNARS Edisi 1 RS. Jiwa Prof. HB. Saanin lulus dengan Peringkat Dasar. Dengan semangat yang tinggi dan usaha yang keras akhirnya pada tahun 2022 pada survei Akreditasi versi LARSDHP RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang kembali meraih predikat paripurna.

Berdasarkan target yang ditetapkan, maka Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang telah meraih target yang ditetapkan yaitu terakreditasi paripurna.

2). **Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Seluruh Layanan Rumah Sakit**

"Kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang merupakan salah satu indikator kinerja utama yang menjadi perhatian serius pihak manajemen rumah sakit. Pengukuran kepuasan ini dilakukan melalui 18 elemen indeks kepuasan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun sebagai bagian dari komitmen rumah sakit dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai layanan yang diberikan oleh rumah sakit, mulai dari pelayanan medis, pelayanan administrasi, hingga pelayanan penunjang lainnya. Hasil survey ini menjadi dasar evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus dilakukan oleh pihak manajemen untuk memastikan bahwa setiap aspek pelayanan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat yang dilayani.

Untuk menjaga agar hasil survey tetap valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, pihak rumah sakit secara sengaja menyerahkan pelaksanaan survey kepada pihak yang independen, yaitu pihak di luar lingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Langkah ini diambil untuk menghindari adanya konflik kepentingan dan memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan persepsi dan pengalaman nyata masyarakat pengguna layanan tanpa adanya pengaruh atau intervensi dari pihak internal rumah sakit. Pada tahun 2025 ini, kepercayaan tersebut diberikan kepada LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Andalas Padang, sebuah lembaga akademik yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik dalam pelaksanaan penelitian dan pengukuran di bidang pelayanan publik.

Hasil yang dicapai menunjukkan tren yang sangat menggembirakan dan menjadi bukti nyata dari kerja keras seluruh jajaran RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Realisasi nilai IKM pada tahun 2024 tercatat sebesar 94,91%, dan pada tahun 2025 mengalami kenaikan yang berarti menjadi 95,58%. Peningkatan ini, meskipun tampak dalam angka yang relatif kecil, sesungguhnya mencerminkan upaya perbaikan yang konsisten dan berkelanjutan di berbagai lini pelayanan yang tidak mudah dicapai, mengingat ekspektasi masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Bila dibandingkan dengan target nilai IKM RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 94,91%, maka dapat diketahui bahwa persentase capaian IKM tahun 2025 berhasil mencapai angka sebesar 100,7%. Capaian yang melampaui target ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan oleh seluruh civitas rumah sakit, karena tidak hanya berhasil memenuhi target yang ditetapkan, tetapi bahkan melampauinya. Dalam skala penilaian internal rumah sakit, capaian ini masuk ke dalam kategori Sangat Baik, yang menjadi cerminan dari dedikasi dan komitmen

seluruh tenaga medis, paramedis, dan staf administrasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pasien dan keluarga yang datang.

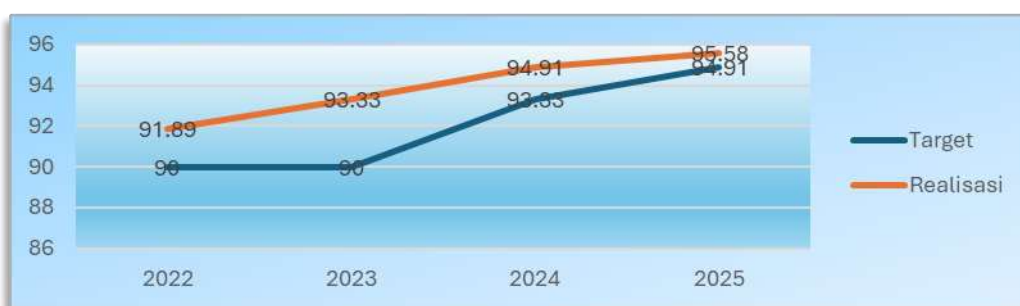
Lebih dari itu, pencapaian ini juga mendapatkan pengakuan secara nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan & RB RI) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, nilai IKM yang diraih oleh RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada tahun 2025 termasuk ke dalam rentang nilai 88,31 hingga 100, yang secara resmi dikategorikan sebagai Sangat Baik. Kategori tertinggi dalam sistem penilaian nasional ini menjadi bukti bahwa standar pelayanan yang diterapkan oleh RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang telah sejajar dengan standar pelayanan publik terbaik di tingkat nasional, dan menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan di masa-masa yang akan datang."

Jika dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3
Pengukuran Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
		Trgt	Real	Trgt	Trgt	Real	Trgt	Trgt	Real
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90,18	90	93,33	93,33	94,91	94,91	95,58

Trend Perkembangan Nilai IKM dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Grafik diatas menunjukkan bahwa nilai IKM tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2024. Kenaikan tersebut salah satunya di latar belakang oleh peningkatan kualitas pelayanan sehingga mendapat respon positif dari masyarakat.

Pencapaian IKM tahun 2025 dengan kategori Sangat Baik sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh rumah sakit diantaranya:

- a) Peningkatan SDM melalui Pendidikan, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis dengan biaya yang dianggarkan sebesar Rp. 222.436.784 yang berasal dari dana RBA BLUD.
- b) Peningkatan sarana prasarana yang menunjang pelayanan dan pengembangan layanan RS sehingga dapat diakses lebih mudah oleh Masyarakat. Biaya yang dianggarkan dengan total sebesar Rp. 968.338.600 yang berasal dari Belanja RBA BLUD.
- c) Pemberian informasi secara kontinyu kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung (leaflet, banner, running Teks, media cetak maupun elektronik). Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut Rp. 30.000.000,- bersumber dari dana RBA BLUD.
- d) Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dengan menyediakan ruangan pengaduan dan memperbanyak kotak pengaduan, sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhannya.
- e) Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang terus mengembangkan inovasi layanan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. pada tahun 2025 RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang telah mengembangkan inovasi layanan Promosi kesehatan melalui kegiatan Deteksi Dini Gangguan Mental Emosional dan Penanganannya di komunitas sekolah pada kabupaten/kota di Sumatera Barat. Peningkatan layanan promkes melalui kegiatan Deteksi Dini Gangguan Mental Emosional dan Penanganannya di komunitas sekolah melalui Aplikasi "TALK GME"

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Pada sasaran 1 diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu: Nilai Evaluasi SAKIP SKPD

Tujuan 1	Sasaran 1
Terwujudnya RS yang Mandiri	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6 Pengukuran Kinerja Sasaran:
Meningkatnya Tatakelola Rumah Sakit

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	A (83,77)	A (85,94)	102%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 tabel 6 dapat disimpulkan bahwa meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada Tahun 2025

berdasarkan Nilai SAKIP sebesar 102% dan dalam skala pengukuran kategori **Sangat Baik**.

Selanjutnya capaian indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

1) Nilai Evaluasi SAKIP SKPD

Penilaian Evaluasi SAKIP SKPD merupakan penilaian akuntabilitas kinerja RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yang dievaluasi setiap tahunnya. Penilaian akuntabilitas kinerja SKPD dinilai oleh Inspektorat dan dilaporkan dalam bentuk hasil penilaian atas kinerja organisasi dan kinerja keuangan organisasi. Bentuk akhir dari SAKIP adalah dalam bentuk laporan kinerja yaitu LAKIP.

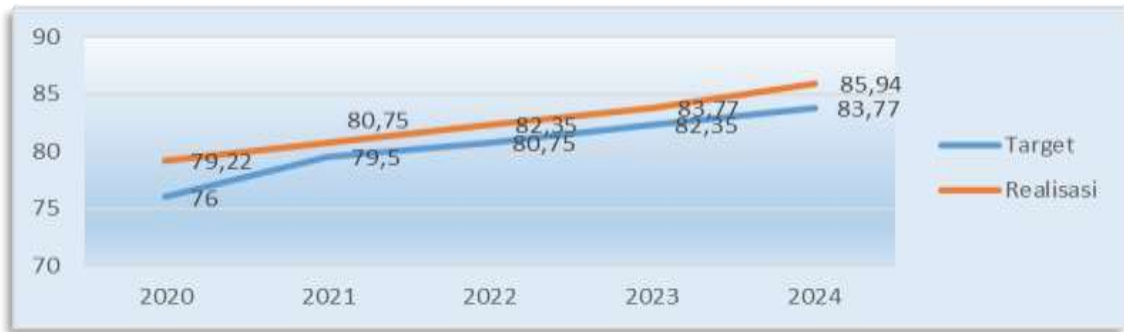
Dalam penilaian LAKIP ini materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen: Komponen pertama adalah perencanaan kinerja yang terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Komponen kedua adalah pengukuran kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran. Komponen ketiga adalah pelaporan kinerja yang terdiri dari pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja. Komponen ke empat adalah evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi dan komponen ke lima adalah pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan dan kinerja lainnya.

Realisasi SAKIP tahun 2025 merupakan hasil penilaian dari LAKIP Tahun 2024 dengan nilai adalah A (85,94). Bila dibandingkan dengan target nilai LAKIP RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yang telah ditetapkan A (83,77), maka dapat diketahui persentase capaian nilai LAKIP Tahun 2025 adalah sebesar 102%, ini berarti dalam skala penilaian **Sangat Baik**. Realisasi nilai LAKIP tahun 2019 – 2032 dapat dilihat dari tabel 7 dibawah ini:

Tabel. 7 Pengukuran Indikator Kinerja: Nilai Evaluasi SAKIP SKPD

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
		Trgt	Real	Trgt	Real	Trgt	Real	Trgt	Real	Trgt	Real
1	Nilai Evaluasi Sakip SKPD	76	79,22	79,5	80,75	80,75	82.35	82,35	83.77	83.77	85,94

Perkembangan Nilai LAKIP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai LAKIP mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024, berada pada kategori A dengan nilai 85,94.

Pencapaian LAKIP pada tahun 2024 dengan kategori Sangat Baik sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit diantaranya:

1. Melibatkan semua unsur bidang/ bagian untuk terlibat dalam perencanaan sehingga perencanaan menjadi suatu acuan yang disepakati bersama untuk dilaksanakan.
2. Melakukan pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk setiap triwulan sehingga dapat diantisipasi segala kendala dengan cepat.
3. Melakukan pengukuran terhadap kinerja eselon II, III, IV dan staf.
4. Eselon II, III dan IV membuat rencana aksi setiap triwulan.
5. Melakukan pelaporan capaian kinerja melalui e-SAKIP REVIU (esr.menpan.go.id).
6. Mengirimkan laporan setiap triwulan ke biro organisasi

Untuk peningkatan penilaian LAKIP dimasa yang akan datang diperlukan:

1. Pengembangan IT dalam perjanjian dan pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi yang bernama SIPOLIN (Sistem Pengukuran Kinerja Online).
2. Melakukan revisi perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja dari eselon II, III, IV dan staf sehingga sasaran, indikator, dan target sudah memiliki hubungan kasualitas dan breakdown dari atasan.
3. Membuat pelaporan PK dan Rencana Aksi setiap triwulan yang laporannya disampaikan ke Biro Organisasi.
4. Pada tahun 2025 Aplikasi SIPOLIN (Sistem Pengukuran Kinerja Online) yang merupakan sistem pendukung dalam pengukuran kinerja pegawai berhasil masuk ke dalam salah satu inovasi daerah Provinsi Sumatera Barat yang diusulkan oleh RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

3. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit

Tujuan Meningkatnya kemandirian Rumah Sakit menggambarkan kemampuan RS dalam melaksanakan tata kelola RS dan membiayai seluruh pengeluaran baik operasional maupun investasi dengan dana yang bersumber dari pendapatan rumah sakit, kemampuan dalam mengelola SDM dan tata kelola RS. Tujuan kedua dapat diukur dengan 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatkan kemandirian keuangan RS.

Pada sasaran 1 diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu: Tingkat Kemandirian Keuangan RS (TKK)

TUJUAN 1	SASARAN 1
Terwujudnya RS yang Mandiri	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Rumah sakit

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 8 sebagai berikut:

TABEL 8		Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya Kemandirian Keuangan Rumah Sakit(TKK)		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Tingkat Kemandirian Keuangan RS (TKK)	43,48%	45,01%	103.05%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 tabel 8 dapat disimpulkan bahwa meningkatnya tata kelola di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada Tahun 2025 berdasarkan realisasi capaian sebesar 105% dan dalam skala pengukuran kategori **Sangat Baik**.

Selanjutnya capaian indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

1). Tingkat Kemandirian keuangan RS (TKK)

Tingkat Kemandirian Keuangan merupakan salah satu indikator kinerja keuangan rumah sakit. Indikator ini menggambarkan kemampuan RS membiayai seluruh biaya rumah sakit, dari pendapatan murni rumah sakit.

TKK adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan RS menutupi biaya (*cost*) dibandingkan dengan penerimaan dari pendapatan pelayanan pasien (*revenue*). TKK dihitung dari persentase perbandingan antara total pendapatan dengan total biaya belanja rumah sakit dengan nilai idealnya diatas 40%.

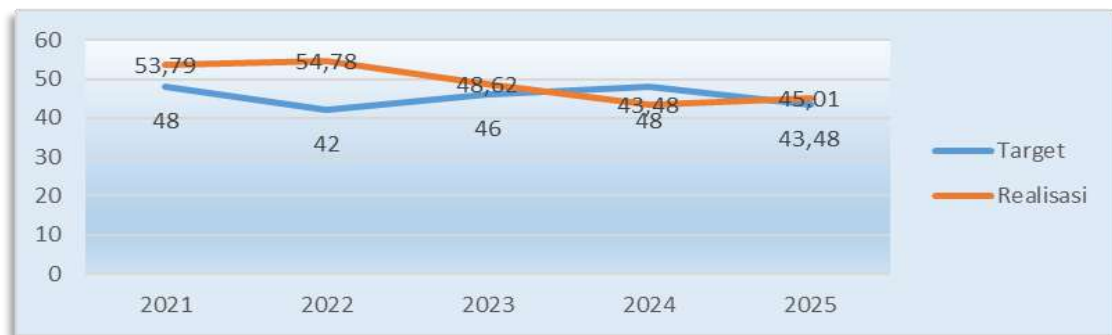
Realisasi TKK Tahun 2025 sebesar 45,01%, hal ini menunjukkan persentase capaian TKK Tahun 2025 adalah sebesar 103,5% dengan skala penilaian Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan TKK secara nasional adalah minimal 40%, TKK RS Jiwa Prof HB Saanin sudah berada pada rentang diatas Standar Minimal Nasional.

TKK merupakan indikator yang baru diperhitungkan mulai tahun 2016, namun demikian pada laporan ini sebagai pembanding tingkat capaian dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel. 9 Pengukuran Indikator Kinerja: Persentase (%)TKK

No	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
		Trgt	Real	Trgt	Real	Trgt	Real	Trgt	Real	Trgt	Real
1	Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK)	48	53,79	42	54,78	46	48,62	48	43,48	43,48	45,01

Trend Perkembangan TKK dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Grafik diatas menunjukkan TKK dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, dimana TKK RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang berada selalu diatas kisaran 40%. Pada tahun 2025 tingkat kemandirian keuangan rumah sakit sebesar 45,01%.

Pencapaian TKK tahun 2025 dengan kategori Baik didukung oleh Pendapatan RS, Belanja APBD dan Belanja BLUD, diantaranya :

1. Target pendapatan tahun 2025 sebesar Rp. 27.695.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.821.222.460,- dengan persentase pencapaian 107,68%.
2. Belanja APBD dimana target belanja APBD sebesar Rp. 37.883.451.160,- terealisasi sebesar Rp. 37.069.923.070,- dengan persentase realisasi sebesar 97,9%. Kegiatannya berupa Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN).
Belanja BLUD 2025 dengan target belanja Rp. 29.483.368.540,- dan realisasi sebesar Rp. 29.177.799.659,-, dengan persentase capaian 99%, kegiatannya adalah peningkatan pelayanan BLUD RS.
4. Total Pendapatan BLUD pada tahun 2025 adalah Rp. 29.821.222.460,- dan Total pengeluaran BLUD ditambah APBD adalah Rp. 66.247.722.729.

Pada tahun 2025 RS Jiwa Prof. HB. Saanin sudah mencapai kinerja keuangan yang sangat baik, kedepannya tentu kinerja tersebut tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Beberapa hal yang kiranya dapat ditingkatkan adalah:

1. Melakukan efisiensi terhadap belanja BLUD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang agar dapat memenuhi target belanja.
2. Meningkatkan layanan pasien jiwa maupun non jiwa dengan memberdayakan tenaga dan sumber daya yang ada di rumah sakit
3. Meningkatkan promosi dan edukasi kepada masyarakat mengenai layanan kesehatan khususnya layanan kesehatan jiwa

Adapun efisiensi Anggaran yang dilakukan Rumah Sakit RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang:

1. Melakukan efisiensi belanja APBD dan BLUD.
2. Melakukan efisiensi perjalanan dinas dengan mengurangi frekuensi kegiatan dan jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas
3. Melakukan efisiensi biaya cetak dengan mengurangi percetakan ke pihak ke-3, dan mengoptimalkan penggunaan percetakan rumah sakit
4. Mengurangi pemakaian kertas (paperless) dengan cara merubah sistem manual ke sistem digital dengan menggunakan rekam medik elektronik (RME), pemanfaatan anjung pendaftaran online (APM)
5. Menunda belanja barang jasa/ modal yang tidak/belum prioritas dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan prioritas yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat dan upaya pencapaian target kinerja.
6. Melakukan efisiensi pada belanja-belanja seperti belanja bahan habis pakai dan efisiensi hasil tender dan pengadaan lainnya.

b. Realisasi Anggaran

Kinerja keuangan suatu badan publik dapat dilihat keberhasilannya dengan menilai perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan. Rasio tersebut antara lain :

Pertama Rasio efektifitas yaitu pengukuran untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang menggambarkan data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \text{Realisasi pendapatan/Target pendapatan} \times 100\%$$

Kedua Rasio Efisiensi untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data realisasi belanja dan target anggaran belanja. Dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \text{Realisasi belanja} / \text{Target anggaran belanja} \times 100 \%$$

Berikut adalah hasil kinerja anggaran RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun anggaran 2025.

1) Pendapatan Pelayanan BLUD

RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang merupakan SKPD dengan PPK BLUD sehingga pendapatan dihasilkan dari Pelayanan BLUD dan pendapatan lain yang sah, Target pendapatan Tahun 2025 sebesar Rp. 27.695.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.821.222.460,- dengan pencapaian 107%. Berdasarkan hal tersebut maka Rasio Efektifitas dari kinerja keuangan termasuk kategori Sangat baik. Pendapatan melebihi target, walaupun masih adanya penurunan kunjungan pasien ke RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang akibat salah satunya karena rujukan online berjenjang dimana pasien rawat jalan dirujuk dimulai dari RS kelas D, C, B dan A, akan tetapi klaim pembayaran BPJS khusus pasien jiwa dan pasien umum sudah cair dan bisa meningkatkan pendapatan RS pada tahun 2025.

2) Belanja Anggaran OPD

Capaian kinerja keuangan dalam hal ini realisasi belanja RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dapat dilihat pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan RSJ Prof. HB. Saanin Tahun 2025

N O	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Kegiatan			SILPA
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7=3-5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	67.366.819.700	100%	66.247.722.729	98,3%	1.119.096.971,00
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.883.451.160	100%	37.069.923.070	97,9%	813.528.090,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.883.451.160	100%	37.069.923.070	97,9%	813.528.090,00
B	Peningkatan Pelayanan BLUD	29.483.368.540	100%	29.177.799.659	99,0%	305.568.881,00
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	29.483.368.540	100%	29.177.799.659	99,0%	305.568.881,00
TOTAL		67.366.819.700	100%	66.247.722.729	98,34%	1.119.096.971,00

Pada tahun 2025 RS jiwa prof. HB. Saanin Padang hanya memiliki satu (1) program, adapun realisasi per program kegiatan sebagai berikut.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sampai Bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 37.069.923.070,- dengan pencapaian keuangan 97,90%. Permasalahan tidak ditemukan karena gaji dan tunjangan ASN merupakan kegiatan rutin yang memang harus dilaksanakan.

2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Dari target anggaran BLUD untuk kegiatan peningkatan pelayanan BLUD sebesar Rp. 29.483.368.540,- terealisasi sebesar Rp. 29.177.799.659,- dengan pencapaian 99%. Sedangkan realisasi fisik dengan capaian 100%, dimana seluruh kegiatan yang sudah direncanakan terlaksana dengan baik. Dampak dari kegiatan peningkatan pelayanan BLUD ini adalah berpengaruh besar terhadap capaian indikator kinerja utama yaitu nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai 95,58%, Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) 45,01%. Meningkatnya pelatihan pada petugas RS, meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana RS, tercapainya kalibrasi alat kesehatan tepat waktu, disamping terwujudnya pelayanan promosi kesehatan jiwa masyarakat dan peningkatan disiplin aparatur.

c. Pencapaian Target Renstra SKPD berkaitan dengan RENJA SKPD Tahun - tahun sebelumnya.

Pencapaian target renstra RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang secara umum sudah cukup memadai sesuai target yang telah ditetapkan, namun demikian perlu meningkatkan capaian kinerja terhadap program dan kegiatan pada rencana kerja Tahun selanjutnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 11 (Formulir E.55) sebagai berikut:

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
RUMAH SAKIT Jiwa Prof. HB. SAANIN
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV 2025

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2025 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah sid Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sid Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
					(5)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)										(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/100%		(14) = 8+12		(15) = 14/100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		RUMAH SAKIT Jiwa Prof. HB. SAANIN		306.614.000.000	66.415.483.131	66.789.126.181	13.768.263.234	32.182.314.937	47.392.825.229	66.247.722.729	159.591.146.129	239,23	226.006.629.260	73,71																		
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan																		
X.XX		PENUNJANG URBAN		0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan																		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		306.614.000.000	66.415.483.131	66.789.126.181	13.768.263.234	32.182.314.937	47.392.825.229	66.247.722.729	159.591.146.129	239,23	226.006.629.260	73,71																		
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		306.614.000.000	66.415.483.131	66.789.126.181	13.768.263.234	32.182.314.937	47.392.825.229	66.247.722.729	159.591.146.129	239,23	226.006.629.260	73,71																		
1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian persurung urusan pemerintahan daerah provinsi	262.915.000.000	100	64.915.364.252	100	66.789.126.181	100	13.768.263.234	100	32.182.314.778	100	47.392.825.229	100	66.247.722.729	400	159.591.145.989	400,00	239,23	500	224.509.510.220	inf	76,65								
			Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD			43,48	50	9,57	21,74	32,61	43,48	107,4	214,80	150,88	inf																	
1.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	95	137.308.000.000	96,45	35.147.501.063	96	38.411.126.181	20,44	9.218.584.716	47,77	20.522.586.313	70,35	28.266.615.704	98,34	37.069.923.070	239,9	95.097.709.803	249,37	247,58	333,35	130.245.210.866	350,69	94,86							
1	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	289	137.308.000.000	33,5	35.147.501.063	335	38.411.126.181	335	9.218.584.716	335	20.522.586.313	335	28.266.615.704	335	37.069.923.070	1340	95.097.709.803	400,00	247,58	1373,5	130.245.210.866	481,53	94,86	RSJ SAANIN						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																
Predikat Kinerja																																
1.02.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat Kemandirian Keuangan (BLUD)	52	155.607.000.000	43,48	29.767.863.189	50	28.258.000.000	5,57	4.549.698.518	21,74	11.659.728.463	32,61	19.106.205.525	43,48	29.177.799.658	107,4	64.493.436.165	214,80	227,91	150,88	94.261.299.354	290,15	60,58							
2	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Pemunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemunjang Pelayanan	52	155.607.000.000	12	29.767.863.189	1	28.258.000.000	1	4.549.698.518	1	11.659.728.463	1	19.106.205.525	1	29.177.799.658	4	64.493.436.165	400,00	227,91	16	94.261.299.354	30,77	60,58	RSJ SAANIN						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																
Predikat Kinerja																																
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN URUPA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		12.013.000.000	94,91	1.500.118.879	89	0,94,91	0,94,91	0,94,91	0,95,38	0,380,31	0,427,31	nan	475,22	1.500.118.879	inf	11,62													

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
										I		II		III		IV														(12) = 8+9+10+11
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)	(17)	(18)	(19)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	terlatih sesuai dengan kompetensi																											
1	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	285	786.000.000	335	0	123	0	15	0	59	161	161	0	196	0	431	161	350.41	inf	766	161	268.77	0,00	RSJ SAANIN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								268.77	0,00					
Predkat Kinerja																								ST	SR					

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program dan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan

Faktor pendorong tidak tercapainya target program kegiatan adalah:

- a) Minimnya Minim dukungan anggaran, baik APBD dan dana transfer lainnya.
- b) Minimnya minat dr. Spesialis Jiwa untuk mengembangkan kompetensi Sub spesialis jiwa, dr. Sub Spesialis Jiwa yang dimiliki saat ini sudah memasuki purnabakti yang diberdayakan kembali (Persyaratan SDM yang wajib ada untuk RS. Khusus jiwa kelas A).
- c) Belum terpenuhinya kualifikasi SDM untuk dr. Spesialis Anestesi untuk pengembangan layanan ICU dan pelayanan ECT Premedikasi, karena keterbatasan jumlah dan minat SDM terkait yang SIP nya bisa ditempatkan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin.2.

Faktor pendukung tercapainya target program kegiatan adalah:

- a) Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Peningkatan kinerja yang sangat baik.
- b) Pemenuhan standar fasilitas sarana, prasarana dan alat Kesehatan berorientasi pada pemenuhan standar fasilitas RS. Khusus kelas A dan standar Akreditasi Paripurna.
- c) Terlaksananya fungsi rumah sakit yang selalu memberikan pelayanan dan kepuasan Peningkatan yang terbaik.
- d) Peningkatan Tata Kelola Pelayanan BLUD.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD

Capaian program Renstra SKPD Tahun 2025 rata-rata tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2025, sehingga secara keseluruhan target Renstra pada tahun ke-3 tahun 2025 terpenuhi.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengadaan sarana dan prasarana, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik, terutama pada kegiatan yang bersumber pada APBD.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sebagai PPK BLUD RSUD dapat dilakukan antara lain melalui:
 - 1) Pemenuhan standar fasilitas sarana, prasarana dan alat Kesehatan berorientasi pada pemenuhan standar fasilitas RS. Khusus kelas A dan standar Akreditasi Paripurna.

- 2) Pengembangan inovasi layanan berbasis Elektronifikasi (Pendaftaran Online, RME, APM) untuk memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan meningkatkan respon time pelayanan.
- 3) Mengembangkan Inovasi layanan MPKP (Model Praktek Keperawatan Profesional) pada setiap ruang rawat inap Psikiatri.
- 4) Memperkuat layanan pengawasan penggunaan Obat melalui pengembangan inovasi layanan “Bela Om Ed”
- 5) Mengembangkan inovasi layanan Kesehatan jiwa kolaboratif; Perawat, Keluarga dan Pasien (Persaga Con Care) dan layanan kolaboratif; Dokter, Keluarga, ODGJ (Laswarangga)
- 6) Pemenuhan kualifikasi dokter DPJP jiwa, perawat, Psikolog dan PPA penunjang layanan.
- 7) Menyelenggarakan pelatihan pelayanan Prima untuk seluruh pegawai sebagai upaya meningkatkan kenyamanan pada masyarakat dalam menerima layanan.
- 8) Meningkatkan sosialisasi, Edukasi penyuluhan Kesehatan jiwa pada masyarakat melalui Unit Keswamas.
- 9) Pengembangan layanan “Fast track” untuk kemudahan akses pelayanan bagi penyandang disabilitas.
- 10) Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM Medis Spesialis Non Jiwa; Pengalokasian anggaran Gaji, Insentif untuk dokter tamu.
- 11) Koordinasi RS. Jejaring dan Kolegium untuk Kerjasama pemanfaatan tenaga dokter spesialis referral non kejiwaan (Rehab medik dan radiologi) untuk pemenuhan kualifikasi SDM spesialisasi non Jiwa.
- 12) Mengkoordinir komite medik dalam penyusunan panduan praktek klinik, Distribusi SDM dan kualifikasi SDM Spesialis Non Jiwa dalam pemenuhan pelayanan spesialisasi Non Kejiwaan.
- 13) Pengembangan layanan One Day Care (Rehabilitasi Psikososial) untuk percepatan pemulihan pasien pasca rawatan dan pembekalan keterampilan agar ODGJ dapat diberdayakan kembali di Masyarakat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis Kinerja pelayanan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang berdasarkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Gawat Darurat:

Dari 9 Indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target

b. Pelayanan Rawat Jalan;

Dari 6 indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

c. Pelayanan Rawat Inap

Dari 13 indikator SPM, 12 indikator memenuhi target SPM, sedangkan 1 indikator belum memenuhi target SPM yaitu:

- 1) Kejadian adanya kejadian rawat ulang (re-admission) pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan

Tidak adanya kejadian rawat ulang (re-admission) pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan 92,3% dari target 100%. Hal ini disebabkan Indikator ini belum tercapai karena masih tingginya tingkat ketergantungan keluarga pada perawatan di rumah sakit. Keluarga merasa belum mampu merawat pasien dirumah karena kesibukan atau tidak adanya yang mengawasi pasien selama di rumah.

d. Pelayanan Rehabilitasi Mental

Dari 4 Indikator SPM, semua Indikator sudah mencapai target.

e. Pelayanan Psikologi

Dari 5 Indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

f. Pelayanan Forensik Psikiater

Dari 5 Indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

g. Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat

Dari 2 Indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

h. Pelayanan Radiologi,

Dari 4 Indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

i. Pelayanan Laboratorium

Dari 4 Indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

j. Pelayanan Farmasi,

Dari 4 indikator SPM, semua indikator sudah tercapai sesuai target.

k. Pelayanan Gizi,

Dari 3 indikator SPM, semua indikator sudah mencapai target.

l. Pelayanan Rekam Medis,

Dari 4 indikator SPM, semua indikator terpenuhi target.

m. Pelayanan pengelolaan limbah,

Dari 2 indikator SPM, semua indikator memenuhi target.

n. Pelayanan administrasi dan manajemen,

Dari 9 indikator SPM, 9 indikator sudah memenuhi target SPM.

o. Pelayanan ambulance/kereta jenazah

Dari 2 indikator SPM, semua indikator memenuhi target SPM.

p. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Dari 1 indikator SPM, semua indikator memenuhi target SPM.

q. Pelayanan laundry,

Dari 2 indikator SPM, semua indikator memenuhi target SPM.

r. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit,

Dari 3 indikator SPM, semua indikator memenuhi target SPM.

s. Pencegahan dan pengendalian infeksi,

Dari 3 indikator SPM, semua indikator memenuhi target SPM.

Analisis kinerja pelayanan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Provinsi Sumatera Barat terutama dalam pelayanan kesehatan jiwa, sesuai dengan indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2029, telah dapat dicapai dengan baik seperti terlihat pada Tabel 12. Pencapaian Kinerja Pelayanan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian Kinerja Pelayanan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD - RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi 2026	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025
1	2	6	7	8	9	10	11	12					
1.	BOR (Bed Occupancy Rate)	87%	88%	89%	89%	67%	64,00%	59,49%	64,00%	69,74%	69,00%	74,00%	70%
2.	LOS (Length Of Stay)	42 hari	42 hari	32 Hari	42 Hari	32 Hari	26 Hari	24,28 Hari	24,16 Hari	26,65 Hari	25 hari	26 hari	32 Hari
3.	BTO (Bed Turn Over)	4 kali	4 kali	10 Kali	4 kali	10 Kali	7,8 Kali	8,79 Kali	9,47 Kali	9,66 Kali	10 Kali	10 kali	10 kali
4.	TOI (Turn Over Interval)	6 hari	6 hari	8 hari	6 hari	8 Hari	21 Hari	16,82 Hari	14 Hari	11,43 Hari	11 Hari	9,5 hari	8 hari
5.	NDR (Net Death Rate)	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	≤ 0,24 %	0,09%	0,42%	0,08%	0,12%	0,15%	0,22%	≤ 0,24 %
6.	GDR (Gross Death Rate)	0,24%	0,24%	0,45%	0,26%	≤ 0,45%	0,04%	0,55%	0,32%	0,27%	0,18%	0,33%	≤ 0,45 %
7.	Jumlah Pasien Masuk	2.100 org	2.100 org	2.100 org	2.100 org	2.560 org	2.279 org	2.385	2,564 org	2558 org	2675 org	2760 org	2,760 org
8.	Jumlah Pasien Rawat Inap	2.150 org	2.150 org	2.150 org	2.150 org	2,760 org	2.235 org	2.515	2,724 org	2750 org	2835 org	2920 org	2,900 org
9.	Akreditasi Standard Pelayanan RS	akreditasi	akreditasi	akreditasi	akreditasi	akreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi

2.3 Isu-isu penting dan catatan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

a. Tingkat Kinerja RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

Kinerja pelayanan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2025 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 13 Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2025
RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Indikator	Target	Realisasi
BOR	67%	74 %
AVLOS	32 hari	26 hari
BTO	10 kali	10 kali
TOI	8 hari	9,5 hari
NDR	0,24%	0,22%
GDR	0,45%	0,33%
Jumlah Pasien Masuk	2.560 org	2.760 org
Kunjungan Rawat Jalan	25.600 org	23.616 org
Kunjungan Rawat Inap	2.750 org	2.920 org

Berdasarkan kinerja, pelayanan yang diberikan umumnya berada diatas rata-rata. Capaian kinerja Pelayanan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang melebihi target yang ditetapkan. Selanjutnya untuk capaian kinerja keuangan dalam hal ini realisasi pendapatan pelayanan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 14 Realisasi Pendapatan Pelayanan
RS. Jiwa Prof. Hb. Saanin Padang Tahun 2025

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET 2025	REALISASI PER 31 DESEMBER 2025	
			(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN OPERASIONAL DARI JASA LAYANAN	26.641.140.228	28.673.764.320	107,63%
2	PENDAPATAN USAHA	1.054.259.772	1.147.458.140	108,84%
JUMLAH		27.695.400.000	29.821.222.460	107,68%

Secara umum pendapatan pelayanan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang terjadi kenaikan pendapatan sehingga dapat melebihi target yaitu 107,68%, dengan realisasi pendapatan Rp 29.821.222.460,-.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RS Jiwa Prof. Hb. Saanin Padang

Permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang antara lain:

1. Kendala dalam Klaim BPJS.
2. Kurang optimalnya kepedulian dan pengetahuan dari SDM Khususnya Tenaga profesional .
3. Kurangnya Dokter Spesialis baik Jiwa dan Non jiwa sehingga masih harus referral ke RS M. Djamil Padang
4. Pengelolaan keluhan pelanggan belum memadai.
5. Belum mencukupi jumlah pegawai yang memberikan pelayanan.
6. Terbatasnya anggaran pelatihan SDM.
7. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang belum memadai.
8. Peralatan kesehatan yang perlu disempurnakan sesuai standar Rumah sakit.
9. Sarana pendidikan dan pelatihan masih perlu ditingkatkan.
10. Cukup besarnya piutang jasa pelayanan pada pasien BPJS, IPWL dan Dinas Sosial.
11. Terjadinya penurunan pasien rawat jalan disebabkan mulai berlakunya rujukan online berjenjang dimana pasien rawat jalan dirujuk online dimulai dari RSUD Kelas D,C,B dan A.
12. Terjadinya penurunan pendapatan sehingga tidak mencapai target berakibat kesulitan RS dalam memenuhi biaya operasional RS.

c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program SDGs dan SPM.

Secara umum hambatan dan permasalahan yang ada di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dalam pencapaian SDGs tidak terlalu berpengaruh secara signifikan karena RS Jiwa Prof. HB. Saanin sebagai pendukung pencapaian SDGs hal ini dibuktikan dengan terbukanya akses pelayanan kesehatan penduduk miskin dengan diterapkannya Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS. Selain dari pada itu penanganan penderita dengan penyalahgunaan Napza melalui pelayanan pengobatan dan rehabilitasi, sementara untuk pencapaian SPM secara umum sudah tercapai dengan baik walaupun masih perlu ditingkatkan.

d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang antara lain:

- a. RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang merupakan satu-satunya rumah sakit khusus pemerintah dalam pelayanan kesehatan jiwa.
- b. RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang ditunjuk sebagai Institusi Pelayanan Wajib Lapor Pecandu Napza.
- c. RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang juga sebagai Institusi Rehabilitasi Napza.

- d. RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang merupakan satu-satunya tempat praktek pendidikan khusus pelayanan kesehatan jiwa.
- e. Sebagai PPK BLUD RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang memiliki kesempatan untuk menjalankan praktek bisnis yang sehat dan keleluasaan penggunaan pendapatan operasional.
- f. Masih adanya lahan yang dapat digunakan dalam pengembangan atau pembangunan rumah sakit.
- g. RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sudah mendapatkan status akreditasi dengan lulus Paripurna.

4. Formula isu-isu penting berupa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2025.

Isu-isu penting yang harus dijawab dalam meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan jiwa, guna ditindak lanjuti dalam program dan kegiatan tahun 2026 sebagai berikut:

- Belum optimalnya kepedulian dan pengetahuan dari SDM khususnya tenaga profesional dan tingginya tuntutan masyarakat yang mengharuskan SDM selalu mengembangkan diri.

Catatan strategis: Dalam melakukan pelayanan bekerja sama dengan tenaga spesialis RS Dr. M.Djamil Padang, Begitu juga spesialis Radiologi, Spesialis Rehabilitasi Medis dari luar, untuk pelayanan lainnya mengoptimisasikan SDM yang ada, salah satunya adalah tenaga dokter spesialis yang kendali ke RS setelah menyelesaikan pendidikannya.

- Masih terdapat peralatan kedokteran yang rusak, begitu juga alat kesehatan Non Medis perlu penambahan dan penggantian yang rusak.

Catatan strategis: Mengupayakan perbaikan semua fasilitas pelayanan di lingkungan rumah sakit, serta mengoptimisasikan pemakaian peralatan kesehatan yang ada sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

- Pemenuhan sarana dan prasarana pada Instalasi Napza masih kurang sehingga perlu penambahan untuk meningkatkan pelayanan

Catatan Strategis: meningkatkan layanan pasien jiwa maupun pasien non jiwa dengan memberdayakan tenaga dan sumberdaya yang ada di rumah sakit.

- Berdasarkan surat edaran dari BPJS Kesehatan tentang rujukan berjenjang mengakibatkan jumlah pasien rawat jalan menurun, hal ini disebabkan mulai berlakunya rujukan online berjenjang dimana pasien rawat jalan dirujuk dimulai dari RSUD kelas D,C, B, A.

Catatan Strategis: Melakukan efisiensi terhadap belanja BLUD RS Jiwa Prof.HB. Saanin padang agar dapat memenuhi target belanja 2025.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat untuk RKPD RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dengan membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan analisis kebutuhan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2025 yang akan menjadi usulan pada Musrenbang Provinsi Sumatera Barat. Proses review rancangan akhir RKPD berguna untuk menggali dan mengakomodir program yang telah dirancang dapat memenuhi kebutuhan SKPD dalam mencapai target Renstra dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, apabila diperlukan untuk percepatan capaian program dapat diusulkan penambahan sesuai dengan kebutuhan tersebut.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan rujukan khususnya kesehatan jiwa baik yang sifatnya perorangan atau masyarakat, peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tabel 15. Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027

Nama SKPD: RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Catatan (***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD				
	Pelayanan dan Penunjang BLUD	Padang	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang BLUD	Rp. 29.000.000.000	
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Padang	IKM		

Sumber: Hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat.

Adapun usulan program kegiatan yang terkait dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Biro Perekonomian sebagai pembina BLUD mengatakan bahwa RS BLUD itu harus mandiri artinya pun tidak bisa lepas dari APBD, bukan untuk mencari keuntungan tapi untuk perbaikan pelayanan.
2. Mensosialisasikan ke masyarakat terkait peningkatan informasi publik.
3. Mensosialisasikan ke masyarakat terkait pelayanan anak dan remaja seperti gangguan belajar, autism, layanan Napza, dll.

4. Usulan RS.Jiwa Prof. HB. Saanin Padang terakreditasi menjadi Akreditasi RS Pendidikan, bukan hanya untuk Pendidikan Kedokteran, tapi juga profesi lainnya.
5. BNN Provinsi Sumatera Barat, bukan hanya penangkapan tapi termasuk pembinaan, penguatan lembaga organisasi dan masyarakat. RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang satu-satunya yang memiliki Rawat Inap, permasalahan di lapangan banyak ditemukan permasalahan hukum. Pecandu wajib melaporkan diri dan direhabilitasi di RS dan penyalahgunaan akan ditindak dengan aturan hukum.
6. Diharapkan adanya integrasi dan koordinasi antara RS.Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, Dinas Sosial dan DUK Capil untuk data kependudukan ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa).
7. Untuk meningkatkan pendapatan, perlu ditingkatkan layanan potensial seperti rawat inap psikiatri, rawat inap Napza.
8. Sosialisasi Pelayanan Non Jiwa ke masyarakat, agar masyarakat mengetahui kalau di RS.Jiwa Prof. HB. Saanin Padang tidak hanya melayani pasien jiwa tapi juga melayani pasien non jiwa.
9. Diharapkan upaya dari pihak RS.Jiwa Prof. HB. Saanin Padang terkait permasalahan lingkungan, Fokus pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat, ada beberapa perumahan diluar RS.Jiwa Prof. HB. Saanin Padang merehab pasien.
10. Kegiatan pengembangan RS, ada beberapa lokasi lahan kosong, kami bermaksud memanfaatkan sesuai dengan arahan camat. Tempat tsb terpisah dari lokasi RSJ dan ditumbuhi semak belukar dan sampah.
11. Permasalahan Pemagaran, kami berharap solusi keamanan NAPZA, agar akses tersebut dibuka dan pembuatan Pos Security (diperkuat).
12. UKM perlu kerjasama lingkungan sekitar, dan jika ada kebutuhan SDM di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang agar diprioritaskan warga sekitar RS.Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
13. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami masyarakat.
14. Tetap memberikan pelayanan kesehatan yang optimal pada masyarakat miskin.
15. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui dialog interaktif atau penyuluhan tentang kesehatan jiwa baik di rumah sakit, media cetak maupun media elektronik.
16. Melaksanakan *home visite* untuk pasien dengan kasus-kasus tertentu dan pemulangan / penguburan pasien miskin yang tidak dijemput keluarga.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TA. 2027

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan Misi Pembangunan 5 tahun ke depan adalah mandiri dibidang ekonomi, berdaulat dibidang politik dan berkepribadian dalam budaya, RPJMN 2025-2029 berupa sembilan agenda prioritas, bidang kesehatan fokus pada prioritas kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dengan strategi pada dimensi pembangunan manusia melalui pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental/karakter, melalui pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat. Sejalan dengan Renstra Kementerian Kesehatan RI 2025-2029 yaitu upaya Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui Peningkatan upaya Promotif dan Preventif. Indonesia Sehat dengan fokus penguatan pelayanan kesehatan melalui Paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan pemantapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Arah kebijakan Kementerian Kesehatan 2025-2029 adalah Penguatan pelayanan kesehatan primer (*primary health care*), Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (*continuum of care*) dan Intervensi berbasis resiko kesehatan (*health risk*).

Sementara itu arah kebijakan pembangunan kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan tugas dan fungsi RS. Jiwa Prof.HB.Saanin Padang untuk melanjutkan RPJMD 2025–2029 adalah; Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan; Berdasarkan tugas dan fungsi rumah sakit melakukan Urusan Kesehatan dengan program/kegiatan sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ✓ Peningkatan Pelayanan BLUD
 - Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - ✓ Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Dengan Sub kegiatan:
 - Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit
 - Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan.
 - Pengembangan Rumah Sakit
 - ✓ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan Napza
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- ✓ Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan
 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Tujuan dan sasaran Renja RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sesuai dengan Renstra 2022-2026. Rencana kerja rumah sakit disusun untuk mencapai tujuan Menurunkan angka kematian dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Jiwa dengan Indikator Kinerja Utama adalah :
 - 2.1. Tingkat Akreditasi RS dengan target paripurna
 - 2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh pelayanan RS 95 %.
2. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Non Jiwa dengan Indikator Kinerja Utama adalah:
 - a. Presentase (%) pasien non jiwa yang ditangani dokter spesialis 100%.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Rumah Sakit dengan indikator kinerja utama adalah:
 - a. Penilaian SAKIP A
4. Meningkatnya Kemandirian rumah sakit dengan indikator kinerja utama adalah:
 - a. Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) 60 %.

Maka Tujuan dan Sasaran RENJA Tahun 2027 RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yang tergabung di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2025-2029 dan didasari dengan perkiraan pencapaian tahun 2027 adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 16. Target dan Tujuan Sasaran Renja Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran dan Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2027
A	Meningkatnya Derajat Kesehatan Perorangan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Jiwa		
		1. Indeks Kepuasan Masyarakat.	%	95,3 (A)
		2. Tingkat Akreditasi Rumah Sakit.	Tingkat (%)	Paripurna (83)
B	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi		
		1. Nilai Evaluasi SAKIP	%	84 (A)
		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Rumah Sakit		
		1. Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit.	%	43.53

Berdasarkan tabel sasaran kinerja tahun 2027, RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang menetapkan dua tujuan utama. Pertama, “Meningkatnya Derajat Kesehatan Perorangan”, yang diukur melalui peningkatan kualitas Kesehatan Jiwa dengan dua indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan mencapai 95,3 (kategori A) dan Tingkat Akreditasi Rumah Sakit ditargetkan meraih predikat Paripurna dengan skor 83, keduanya diperkirakan tercapai 100%. Kedua, “Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit”, yang mencakup sasaran turunan—akuntabilitas kinerja organisasi yang diukur melalui Nilai Evaluasi SAKIP OPD dengan target 84 (A), serta kemandirian keuangan rumah sakit yang diukur melalui Tingkat Kemandirian Keuangan dengan target 43,53%.

3.3 Program dan Kegiatan

1. Faktor-Faktor Pertimbangan dalam Perumusan Program dan Kegiatan

- a. Seluruh program dan kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Perumusan program mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran institusional RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yang telah ditetapkan.
- c. Perkiraan capaian kinerja sasaran tahun 2026 yang menunjukkan hasil positif menjadi dasar penyusunan target program ke depan.
- d. Ketersediaan SDM yang memadai dan didukung peralatan medis serta penunjang medis sesuai kompetensi menjadi modal utama pengembangan layanan.
- e. Penetapan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sebagai Rumah Sakit Kelas A

- Khusus Jiwa menjadi landasan strategis bagi peningkatan mutu dan kapasitas layanan.
- f. Peningkatan kapasitas rawat inap Instalasi NAPZA secara bertahap menjadi 70 tempat tidur, direncanakan untuk mengakomodasi pertumbuhan kebutuhan layanan rehabilitasi ketergantungan.
 - g. Pengembangan layanan non-jiwa diprioritaskan melalui peningkatan standar fasilitas rawat jalan dan rawat inap pada spesialisasi Saraf, Penyakit Dalam, dan Anak.
 - h. Perubahan status kelembagaan dari rumah sakit khusus jiwa menjadi Rumah Sakit Umum (RSU) dengan layanan unggulan jiwa menjadi arah transformasi yang menentukan.
 - i. Pemenuhan kebutuhan SDM medis wajib—meliputi dokter Subspesialis Jiwa Anak dan Remaja, dokter Spesialis Bedah, serta dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi—menjadi prioritas dalam mendukung transformasi layanan.
 - j. Seluruh program dan kegiatan diselaraskan dengan Rancangan Awal dan Pagu RKPD Tahun 2027 sebagai kerangka perencanaan dan penganggaran daerah yang mengikat.

2. Program dan Kegiatan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2027 sesuai RKPD yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan untuk Tahun 2027 sesuai pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD terdiri dari 3 Program, 5 Kegiatan, dan 8 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp63.940.280.331,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp34.940.280.331,- dan BLUD sebesar Rp29.000.000.000,- Adapun uraian Program, Kegiatan, serta pagu indikatif anggaran dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp63.909.386.760,- Meliputi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp34.909.386.760,- dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp34.909.386.760,- serta Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Rp29.000.000.000,- dengan Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp29.000.000.000,-;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp15.446.786,- Meliputi Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Rp13.446.786,- dengan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Rp6.723.393,- dan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Rp6.723.393,- serta Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Rp2.000.000,- dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA Rp1.000.000,- dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang Berisiko Masalah Kesehatan Jiwa Rp1.000.000,-;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp15.446.785,-

Meliputi Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Rp15.446.785,- dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp15.446.785,-

Tabel 17. Rencana Program Tahun 2027 Dan Prakiraan Maju Tahun 2028

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2028	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		-	-	63.940.280.331,00	-	-	-	65.462.047.991,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	-	100 44	63.909.386.760,00	-	-	-	65.433.027.562,00
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				34.909.386.760,00				38.105.121.409,00
1.02.01.1.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	420 Orang/Bulan	34.909.386.760,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	38.105.121.409,00
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				29.000.000.000,00				27.327.906.153,00
1.02.01.1.10.00 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	20 Unit Kerja	29.000.000.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	27.327.906.153,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	-	103 19,25	15.446.786,00	-	-	-	14.510.214,00
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				13.446.786,00				12.510.214,00
1.02.02.1.01.00 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	2 Unit	6.723.393,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	4.170.071,00
1.02.02.1.01.00 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	12 Unit	6.723.393,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	4.170.071,00
1.02.02.1.01.00 26	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	0 Unit	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	4.170.072,00
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				2.000.000,00				2.000.000,00
1.02.02.1.02.00 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	180 Orang	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	1.000.000,00
1.02.02.1.02.00 35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	27.800 Dokumen	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	1.000.000,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	-	25	15.446.785,00	-	-	-	14.510.215,00
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				15.446.785,00				14.510.215,00
1.02.03.1.02.00 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	75 Orang	15.446.785,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	14.510.215,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Tahun 2027 ini memuat program kerja, kegiatan, sasaran beserta indikatornya yang akan dilaksanakan oleh RS Jiwa Prof. HB.Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat.

Indikasi Rencana Kerja dan Pendanaan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2027**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN						63.940.280.331,00							65.462.047.991,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						63.940.280.331,00							65.462.047.991,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						63.940.280.331,00							65.462.047.991,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	63.909.386.760,00						-	65.433.027.562,00	
		[Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah provinsi]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	100 52	100 42	100 42	100 44	63.909.386.760,00	-	-	-	-	-	-	65.433.027.562,00	-
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	34.909.386.760,00				Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas		-	38.105.121.409,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				420 Orang/ Bulan	34.909.386.760,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas		-	38.105.121.409,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	29.000.000.000,00				Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas		-	27.327.906.153,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				20 Unit Kerja	29.000.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas		-	27.327.906.153,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	15.446.786,00						-	14.510.214,00	
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	Angka Kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	15 83	108 20.50	108 20.50	103 19.25	15.446.786,00	-	-	-	-	-	-	14.510.214,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	13.446.786,00			-	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	-	-	12.510.214,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
1.02.02.1.01.0009		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				2 Unit	6.723.393,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	-		4.170.071,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
1.02.02.1.01.0010		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				12 Unit	6.723.393,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	-		4.170.071,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
1.02.02.1.01.0026		Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				0 Unit	0,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	-		4.170.072,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	2.000.000,00			-	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	-	-	2.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
1.02.02.1.02.0014		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis				180 Orang	1.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	-		1.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
								15.446.786,00							14.510.214,00	
1.02.02.1.02.0035		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang bertsiko Masalah Kesehatan Jiwa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang bertsiko Masalah Kesehatan Jiwa				27800 Dokumen	1.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	-		1.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	15.446.785,00						-	14.510.215,00	
		[Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga keehatan]	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	45	20	20	25	15.446.785,00	-	-	-	-	-	-	14.510.215,00	-
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	15.446.785,00			-	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	-	-	14.510.215,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				75 Orang	15.446.785,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	-	-	14.510.215,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
		J U M L A H							63.940.280.331,00						65.462.047.991,00	

BAB V PENUTUP

Rencana kerja SKPD RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun Anggaran 2027 disusun dengan berpedoman kepada RPJMN 2025-2029, Renstra 2025-2029 Kementerian Kesehatan RI, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2025–2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang 2025-2025.

Hal – hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RENJA Tahun 2027 adalah.

1. Pelayanan pasien yang tidak mampu harus ada koordinasi dan sinkronisasi antara program yang dilaksanakan di provinsi dengan program kab/kota, dalam hal pembiayaan maupun tindak lanjut setelah pasien dikembalikan ke masyarakat.
2. Pemerintah Provinsi bersama dengan pemerintah kab/kota menyediakan rumah singgah/panti rehabilitasi untuk pasien yang dipulangkan dari rumah sakit jiwa.
3. Harus ada program/kegiatan untuk penanganan pasien pasung di dalam APBD provinsi dan kab/kota.
4. Meningkatkan penyuluhan dan promosi pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan masalah korban NAPZA.
5. Meningkatkan kerja sama lintas sektor untuk penanganan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi korban Napza.
6. Perlu peningkatan kemandirian Rumah Sakit melalui peningkatan pelayanan BLUD sehingga kegiatan yang belum tertampung dalam APBD dapat direalisasikan dalam pelayanan BLUD.
7. Peningkatan pelayanan untuk peserta magang dan praktik mahasiswa kesehatan yang setiap tahun terus bertambah, sehubungan RS Jiwa Prof. HB Saanin sebagai rumah sakit pelayanan kesehatan jiwa di Sumatera Barat.

Peningkatan dan pengembangan pembangunan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang baik fisik maupun pengembangan sumber daya manusia disesuaikan dengan permasalahan kesehatan di masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Pelaksanaan Rencana kerja tahun 2027 perlu memperhatikan kaidah-kaidah yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan mengedepankan asas manfaat, berkeadilan, akuntabel dan transparansi.

Rencana tindak lanjut bila penyusunan rencana kerja Tahun 2026 ini disetujui maka perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa dan apabila tidak terakomodir seluruhnya maka perlu dicarikan jalan keluar dengan mengoptimalkan anggaran yang telah ditetapkan.

Rencana kerja Tahun Anggaran 2027 ini telah disusun dengan sebaik-baiknya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sumatera Barat

khususnya masalah kesehatan jiwa, namun masih ada terdapat kekurangan dan kelemahannya, untuk kesempurnaan rencana kerja ini kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.